

ABSTRAK

Pembangunan *Flyover* Ciroyom di Kota Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarkawasan. Namun, pelaksanaan proyek ini menimbulkan sejumlah permasalahan sosial dan teknis, yang menyebabkan aksi pemblokiran jalan oleh warga serta belum terpenuhinya kelengkapan jalan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aksi pemblokiran jalan mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak pembangunan yang dinilai mengabaikan aspek sosial, aksesibilitas, dan komunikasi publik. Di sisi lain, kondisi *Flyover* yang belum dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti marka jalan, rambu lalu lintas, drainase, dan penerangan jalan umum (PJU) berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, implikasi hukum, serta merumuskan solusi atas dua permasalahan utama tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan landasan teori-teori dan konsep yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Tahap penelitian ini yaitu meliputi penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan dalam teknik pengumpulan data. Analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna dan penyelenggara jalan sama sama memiliki kesalahannya masing masing, dalam hal penyelenggara jalan bertanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan di proyek pembangunan *Flyover* ciroyom yang memiliki banyak problematika seperti hal paling utama tidak adanya alat kengkapan jalan yang menyebabkan warga berinisiatif melakukan pemblokiran jalan sebagai upaya bentuk mengekspresikan hal mereka dalam partisipasi tanggung jawab keamanan dan kenyamanan penggunaan jalan yang seluruhnya diatur dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pengguna Jalan, Pemblokiran Jalan